

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi*, Yogyakarta; Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda.2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: kencana.
- Chairul Huda.2006 *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Padang: Raja Grafindo
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, cet ke-1*. Jakarta: Nusantara Persada Utama.
- Hanafi Amrany, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet-pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Anshori Saleh, 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta; Storia Grafika.
- Ludia Kartika wisanti “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Sebagai Pelaku Cyberporn*” Skripsi pada Program Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung:Pustaka Setia
- M.Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*.Jakarta; Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pres.
- Rismawan Pradiptyo. 2016. *Dampak Sosial Korupsi*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Artasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta; Prenada Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2009. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, FH UII.
- SF. Marbun.1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- S.R Sianturi. 1985. *Pengenalan Dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Cet III, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Konsorsium Rerformasi hukum Nasional, 2008,

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1952 tentang Peraturan Dewan Kehormatan Militer.
- Peraturan Panglima TNI Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan Oditurat.
- Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Jurnal

- Dewa Gede Atmadja. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996,
- Kadek wijana. “pengadilan tindak pidana korupsi bagi anggota militer”. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol 2 No. 3. 2020. Halaman 404-408
- Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian*, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, hlm. 4 <https://www.dilmiltama.go.id/home/ejournal/YurisdiksiPeradilanMiliter.pdf>, diakses 09 Oktober 2024.
- Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, *Yuridika*, Vol.7, No.5-6, 1997 (copyright pada website *Yuridika* tahun 2017), (selanjutnya disebut Philipus M. Hadjon I), h.1, <https://drive.google.com/file/d/0B2fDcUsEEyr2OWpqQ0g3RV9zalE/view>, diakses pada tanggal 14 September 2019.

Internet

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perwira TNI AU di Sidang Korupsi Helikopter AW-101: Karir Saya Hancur gara-gara Ini", [Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/17374871/perwira-tni-au-di-sidang-korupsi-helikopter-aw-101-karir-saya-hancur-gara?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/17374871/perwira-tni-au-di-sidang-korupsi-helikopter-aw-101-karir-saya-hancur-gara?page=all). Diakses pada 07 Oktober 2024

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>.

Website Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, <https://dilmulti-jakarta.go.id>.